DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agung, Mahkamah. Mahkamah Agung RI,Buku Panduan *e-Court* Mahkamah Agung (2019).

Amalia M., Bakry Separino, S. "Teori Hukum Positif" 2025 (n.d.)

———. *Teori Hukum Positif*. Indonesia, 2025.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan*. Edited by Tim Alumni. 2020th ed. Bandung: P.T. Alumni, n.d.

Hamzah, M. Guntur. *Peradilan Modern*. 2023rd ed. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023.

Juhriyansyah Dalle, A. Akrim, Baharuddin. *Pengantar Teknologi Informasi*. Edited by Nuraini. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergerakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Sondang, Siagian P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.

Tri Rachmadi. *Pengantar Teknologi Informasi*. Tiga Ebook, 2020.

Wibowo, Agus. *Hakim, Teknologi Dan Artificial Intellegence (AI)*. Semarang: Universitas Sains dan Teknologi, n.d.

B. Jurnal

Afor, Saiful, and Fajri Arkiang. "Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan" 11, no. 2 (2022): 164–75.

Anggara, Satrya Ramadhan, and Moh Imam Gusthomi. "Urgensitas Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional" 5, no. 1 (2026): 8426–33.

Angkasa, Nawa. "Implementation of E-Court and Its Impact on Justice Seekers in the Legal Process at the Religious Court" 21, no. 1 (1829): 122–38.

Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" 1, no. 1 (2023): 6–10.

Arrumasya, Syafarina, Novia, Raihan Bagaskara. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di PTUN Semarang" 4 (2025).

Aspani, Budi, Kompetensi Absolut, Dan Relatif, Peradilan Tata, and Usaha Negara. "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004" 16 (2018).

Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205.

Aulia, Keysha Nashwa. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, no. 1 (2024): 713–24.

Fauzan, Ahamd. "Model Implementasi Kebijakan Publik" 4 (2024): 17929–38.

Frans Reumi, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Emi Yoesry, Dian Rahadian. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Gorontalo, Chazim Maksalina Ketua Pengadilan Tinggi Agama. "5 Tahun Peradilan Digital, Perubahan, Manfaat Dan Tantangan." Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, n.d. https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4310-5-tahun-peradilan-digital-perubahan-manfaat-dan-tantangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. "Siti Halilah[1] Mhd. Fakhrurrahman Arif[2]" 4, no. Desember (2021): 56–65.

Halimi, Moh Zunaidi. "Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama" 1 (2024): 34–47.

Heryansyah, Despan, and Kus Pratiwi. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," 2018, 339–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.

Huda, Muhammad Miftakhul, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang Diberikan Oleh Tuhan . Hak Ini Bersifat Universal Tanpa" 11, no. 1 (2022).

Ilmi, Mainatul, Fetri Setyo Liyundira, and Afria Rachmawati. "Perkembangan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia" 16, no. 2 (2020): 436–58.

Joko Sriwidodo, Dwi Andayani Bs. "Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik." *PALAR (Pakuan Law Review)* 07 (2021): 373–88.

Junaedi, Ahmad, and Moersidin Moeklas. "Kedudukan Dan Yuridiksi Peradilan Militer Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" 12, no. 1 (2022): 21–40.

Ketidakefektifan, Analisis, Pelaksanaan E-court, and Sistem Beracara. "Indonesian Research Journal on Education." *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 665–71.

Khoirunnisa, Asifa. "Sistem E-Court Dan Sengketa Ekonomi Syariah : Mewujudkan Keadilan Cepat Dan Terjangkau Dalam Kerangka SDG16," 2025, 81–88.

Kristian. "'Politik Hukum' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman" 4 (2018).

Kurniati, Ifah Atur. "Mengembalikan Citra Pengadilan Melaui E-Court," no. November (2019): 176–85.

Mahkamah, Ketua, and Agung Republik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (2022).

Marfuah. "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Journal Universitas Pasir Pengaraian* 1, no. Juni (2024): 35–44.

Negara, Usaha, Pontianak Terhadap, Asas Cepat, Muhammmad Ihsanul Arif, and Arif Wibowo. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Biaya Ringan , Dan Sederhana The Implementation of the E-Court System in the Administrative Court of Pontianak on the Principles of Speed , Low Cost , and Simplicity Abstrak ISSN (Online): 2828-8378," 2024.

Nuraini, Sulaisyah. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Hukum Dan Kenotariatan* 6 (2022): 1326–40.

Ocarina, Majolica, and Ronaldo Sanjaya. "Gracia , Majolica Ocarina Fae Dan Ronaldo Sanjaya Court Sebagai Perangkat Yang Disediakan , Diharapkan Dapat Membantu Masyarakat Dalam Proses Beracara Secara Sederhana , Cepat , Dan Biaya Ringan Serta Proses Beracara Tetap Terlaksana Di Tengah Pandemi Covid-19 Untuk Menegakan Hukum ." 2, no. 4 (2021).

Panji Purnama, Febby Mutiara Nelson. "Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," 2021, 97–116.

Pengadilan, Pelayanan, Yang Sederhana, D A N Biaya Ringan, Jeklin Patresia Ansek, Angelina Agatha, and Gracia Belekubun. "Implementasi E-

Court Sebagai Wujud" 1, no. 1 (2024): 1–12.

Putri, Inzafani Rahman, Dhody A R Widjajaatmaja, Putra Hutomo, and Universitas Jayabaya. "Volume 2 Nomor 9 September 2023 Metode Circular Resolution Dalam Pengganti Direksi" 2, no. September (2023): 2972–3002.

Said, Muh. "Efektivitas Pengaruh Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian" 6, no. April (2023): 92–100.

Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," no. 3 (2018): 1–17.

Segara, Khoirunnisya Gita, Muhammad Irwan, and Padli Nasution. "Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang" 3, no. 1 (2025).

Sundusiyah, Erie Hariyanto. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan," 2022, 471–98.

Tata, Putusan, Usaha Negara, and Gustav Radbruch. "Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch Alfonsus Nahak Pengadilan Negeri Jember" 2, no. 3 (2023): 11659–74.

Teori, Perspektif, Sistem Hukum, and Lawrence M Friedman. "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara" 8, no. 2 (2024): 244–57.

Wiyanto, Hana Maria, Jalan Raya, Ponorogo No, Kabupaten Madiun, and Jawa Timur. "Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" 10, no. 474 (2022): 76–85.

Yang, Publik, Baik Di, Pengadilan Negeri, and Kota Malang. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan" 2, no. 2 (2020): 58–74.

Yulianingsih, Wiwin. "Perlindungan Represif Dalam Awig-Awig Di Bali Pada Penyelesaian Sengketa Adat" 6, no. 4 (2024): 9889–97.

C. Internet

Chazim Maksalina Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, "5 Tahun Peradilan Digital, Perubahan, Manfaat Dan Tantangan," Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, n.d., https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4310-5-tahun-peradilan-digital-perubahan-manfaat-dan-tantangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h

D. Peraturan Perundang -Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) sebagai ketentuan hukum acara perdata untuk wilayah luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.